



**UNTAR**  
FAKULTAS  
HUKUM

**60<sup>th</sup>**  
UNTAR untuk Indonesia



**BUKU PEDOMAN AKADEMIK**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS TARUMANAGARA** **2019**



 Fakultas Hukum Untar

  @fhuntar\_

[fh.untar.ac.id](http://fh.untar.ac.id)

# KATA PENGANTAR

Pendidikan tinggi hukum merupakan jenjang pendidikan dalam rangka menyiapkan calon intelektual yang bukan hanya mampu menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu mengatasi berbagai permasalahan hukum di masyarakat. Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (FH UNTAR) sebagai salah satu Fakultas Hukum tertua, terbaik, dan terbesar di Indonesia telah berpengalaman menyiapkan intelektual yang memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan program peminatan yang dikehendaki, sehingga setiap lulusan mampu mengimplementasikan kompetensi pada profesi bidang hukum yang digelutinya.

Setiap mahasiswa yang memasuki FH UNTAR akan mendapatkan bekal wawasan tentang perguruan tinggi, baik mengenai lembaga, program studi, kurikulum, administrasi akademik, administrasi, keuangan, kegiatan kemahasiswaan, dan sebagainya, agar setiap mahasiswa dapat melaksanakan studinya dengan baik.

Untuk itu, melalui Buku ini, diharapkan semua mahasiswa dapat memiliki pemahaman secara komprehensif mengenai hal tersebut, yang pada akhirnya dapat membantu keberhasilan proses pembelajaran.

Informasi yang disajikan dalam Buku ini merupakan intisari dari berbagai ketentuan akademik, kemahasiswaan, dan keuangan bagi mahasiswa Fakultas Hukum, baik Program Studi Sarjana Hukum, Program Studi Magister Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan, dan Program Studi Doktor Hukum. Diharapkan buku ini dapat memberi gambaran secara singkat namun lengkap mengenai pedoman akademik di Fakultas Hukum Untar dengan baik.

Jakarta, Juli 2019

Dekan

# DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| Kata Pengantar .....                                 | i  |
| Daftar Isi .....                                     | ii |
| I. FAKULTAS HUKUM                                    |    |
| A. Fakultas Hukum .....                              | 1  |
| B. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Hukum .....        | 2  |
| C. Struktur Organisasi .....                         | 3  |
| II. AKADEMIK   |    |
| A. Program Studi dan Kurikulum .....                 | 7  |
| B. Pembelajaran dan Pemantauan Studi .....           | 7  |
| III. KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI                        |    |
| A. Kemahasiswaan.....                                | 13 |
| B. Alumni .....                                      | 15 |
| C. Kemitraan dengan Orang Tua Mahasiswa .....        | 15 |
| IV. ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN                   |    |
| A. Keuangan .....                                    | 16 |
| B. Administrasi Umum .....                           | 18 |
| V. KURIKULUM   |    |
| A. Program Studi Sarjana (S1) Hukum .....            | 19 |
| B. Program Studi Magister (S2) Hukum .....           | 24 |
| C. Program Studi Magister Kenotariatan (M.Kn.) ..... | 26 |
| D. Program Studi Doktor (S3) Hukum .....             | 28 |
| VI. PENUTUP .....                                    | 29 |

# **FAKULTAS HUKUM**

## **A. Fakultas Hukum**

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (FH UNTAR) merupakan salah satu dari delapan fakultas yang bernaung di Universitas Tarumanagara. FH UNTAR didirikan pada tanggal 1 Oktober 1962. Secara historis, FH UNTAR tercatat sebagai fakultas tertua kedua di Universitas Tarumanagara setelah Fakultas Ekonomi, dan salah satu Fakultas Hukum tertua di Indonesia.

Sejak awal, FH UNTAR telah mendedikasikan diri sebagai lembaga pendidikan tinggi hukum, dalam rangka membantu tugas pemerintah untuk mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan bangsa melalui pendidikan, khususnya di bidang ilmu hukum. Dengan komitmen menyelenggarakan pendidikan sebaik-baiknya, FH UNTAR berhasil mengembangkan diri sebagai salah satu Fakultas Hukum terbaik di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai pencapaian, antara lain: Program Studi Sarjana Hukum dan Program Studi Magister Hukum terakreditasi A, Program Studi Magister Kenotariatan dan Program Studi Doktor Hukum terakreditasi B, Program Studi Sarjana Hukum ditetapkan sebagai program studi unggulan di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, tersertifikasi ISO 9000:2015, program pertukaran mahasiswa secara berkala, antara lain ke University of Malaya dan Kun Shan University, serta berbagai prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional.

Berbagai pencapaian FH UNTAR ini tentu didukung oleh berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang lengkap serta bermutu tinggi. Tenaga pengajar di FH UNTAR sebagian besar berlatar pendidikan doktor lulusan dari universitas terbaik, baik dari dalam maupun luar negeri. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembelajaran tersedia secara lengkap, antara lain terdapat ruang kantor pelayanan, ruang kelas,

ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang diskusi, taman, kantin, mushola, klinik, *pantry*, ruang bimbingan mahasiswa, ruang tunggu mahasiswa, ruang komputer, ruang sekretariat organisasi kemahasiswaan, gelanggang olahraga, *fitness center*, area parkir kendaraan, *Tarumanagara Knowledge Center*, ruang teater, ruang seminar.

Dalam rangka upaya pengembangan terus menerus FH UNTAR, pengelola berkomitmen untuk terus melakukan transformasi melalui internasionalisasi penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui pembukaan kelas internasional, akreditasi/sertifikasi internasional, dan mengembangkan jejaring kerja sama internasional dalam rangka pertukaran mahasiswa di berbagai universitas di dunia.

## **B. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Hukum**

### **Visi**

Menjadi Fakultas Hukum unggul di Asia Tenggara yang memiliki integritas, profesionalisme dan jiwa kewirausahaan pada tahun 2025.

### **Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu hukum yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berlandaskan nilai-nilai integritas, profesionalisme, serta jiwa kewirausahaan.
2. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum di masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat sebagai aplikasi ilmu pengetahuan dan penelitian bidang hukum yang telah dilakukan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung kegiatan dunia usaha.
4. Mengembangkan kerjasama dan memanfaatkan ilmu hukum secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan fakultas dan meningkatkan integritas, profesionalisme, serta jiwa kewirausahaan.

## **Tujuan**

1. Membentuk dan menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan, menghargai pluralitas serta menjunjung tinggi moralitas bangsa dan berbudi luhur.
2. Membentuk dan menghasilkan lulusan yang berintegritas, profesional, serta memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu mengembangkan kompetensi ilmu hukum.
3. Menghasilkan dan mengembangkan ilmu hukum yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.
4. Menghasilkan kerjasama dan jejaring didalam dan luar negeri yang saling menguntungkan yang berlandaskan nilai-nilai Integritas, Profesionalisme, dan jiwa kewirausahaan.

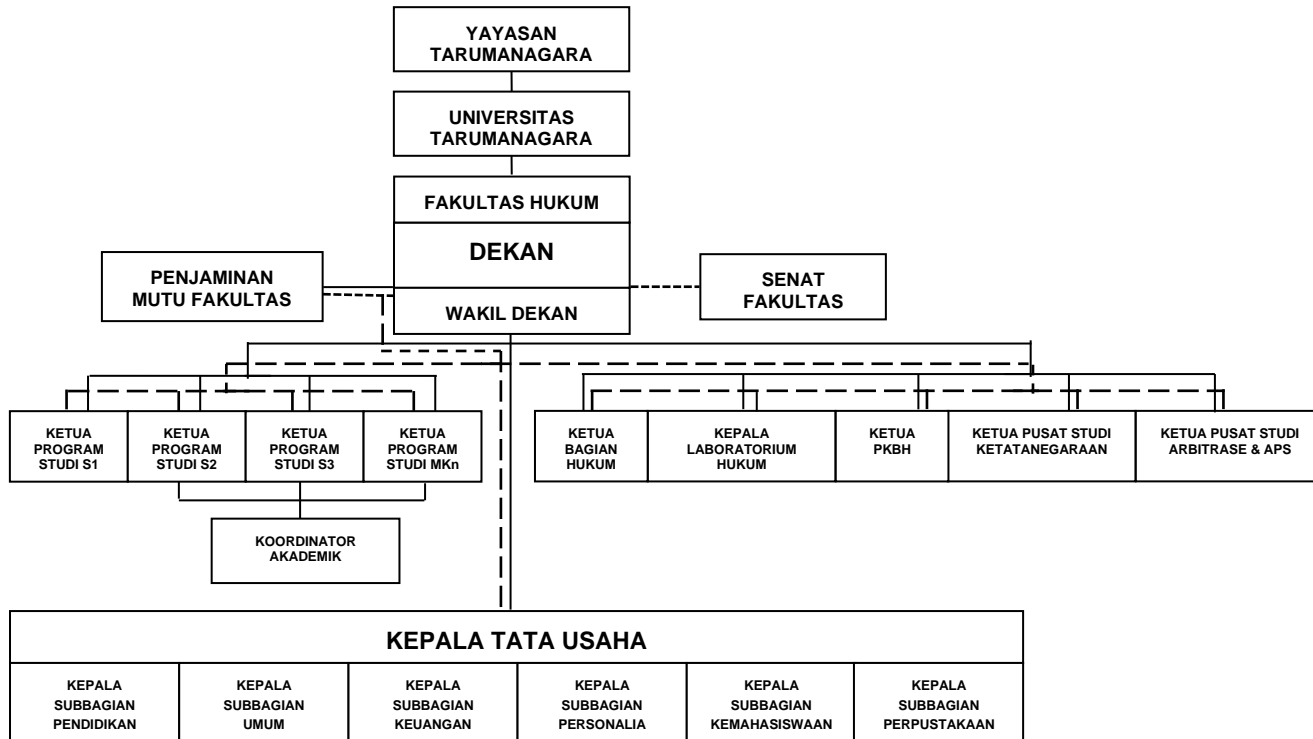
## **Sasaran**

1. Meningkatkan dan Mengembangkan sistem manajemen mutu
2. Meningkatkan kualitas mahasiswa dan dosen
3. Meningkatkan kualitas dan dampak tridharma
4. Meningkatkan nilai akreditasi Program Studi
5. Meningkatkan reputasi Fakultas Hukum
6. Diversifikasi pendapatan
7. Mengembangkan Sistem Teknologi Informasi
8. Mengembangkan SDM
9. Meningkatkan kepuasan SDM dan Steakholder

## **C. Struktur Organisasi**

FH UNTAR berada di bawah Universitas Tarumanagara. Sementara itu, Universitas Tarumanagara berada di bawah Yayasan Tarumanagara. Di dalam FH UNTAR sendiri terdapat struktur organisasi, yang terdiri atas satuan-satuan kerja dengan struktur jabatan tertentu. Masing-masing jabatan memiliki fungsi dan tugas tertentu serta memiliki hubungan fungsional baik secara subordinasi maupun koordinasi.

Struktur Organisasi dimaksud digambarkan sebagai berikut:



Secara singkat struktur organisasi, personalia dan tugasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Senat Fakultas**

Senat FH adalah lembaga normatif dan perwakilan tertinggi ditingkat Fakultas. Keanggotaannya terdiri atas Pimpinan Fakultas, para Guru Besar, dan perwakilan dosen. Fungsi utama Senat menetapkan kebijakan FH dan mengawasi pelaksanaan tugas pimpinan FH sehingga dapat terkontrol dan terkendali secara objektif dan transparan.

### **2. Pimpinan Fakultas**

Pimpinan Fakultas Hukum bersifat kolektif, yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan. Dekan adalah pimpinan tertinggi sedangkan Wakil Dekan adalah pimpinan Fakultas yang berada di bawah Dekan.

- a. Dekan : Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.  
Tugas : Memimpin penyelenggaraan pendidikan tinggi ilmu hukum di FH UNTAR.
- b. Wakil Dekan : Mia Hadiati, S.H., M.H.  
Tugas : Membantu Dekan di bidang akademik, kemahasiswaan, administrasi umum dan keuangan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di FH UNTAR.

### **3. Pembantu Pimpinan Fakultas**

Pembantu pimpinan adalah unsur administrasi pelaksana tugas-tugas pimpinan Fakultas, yang meliputi:

- a. Kepala Tata Usaha : Sumarno, S.H., M.M.
- b. Kepala Subbagian Pendidikan : Widodo
- c. Kepala Subbagian Kemahasiswaan : Widodo
- d. Kepala Subbagian Keuangan : Paimin
- e. Kepala Subbagian Umum : Ngatiran
- f. Kepala Subbagian Personalia : Widiastuti, S.E.



#### 4. Pelaksanaan Akademik

Pelaksana akademik adalah unsur pelaksana tugas pimpinan di bidang akademik, yang terdiri atas:

- a. Ketua Program Studi Sarjana (S1) Hukum:  
Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
- b. Ketua Program Studi Magister (S2) Hukum:  
Prof. Dr. H. K. Martono, S.H., LL.M.
- c. Ketua Program Studi Doktor (S3) Hukum:  
Prof. Dr. Mella Ismelina F. R., S.H., M.Hum.
- d. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan (M.Kn.):  
Prof. Dr. Mella Ismelina F. R., S.H., M.Hum.
- e. Ketua Bagian Ilmu Hukum:  
Dr. Dwi Andayani Budisetyowati, S.H., M.H.
- f. Koordinator Akademik:  
Dr. Cut Memi, S.H., M.H.

#### 5. Penunjang

Penunjang adalah unsur yang ikut membantu pelaksanaan tugas Fakultas Hukum, yang terdiri atas:

- a. Kepala Laboratorium Hukum:  
Christine S. T. Kansil, S.H., M.H.
- b. Ketua Pusat Konsultasi Bantuan Hukum:  
Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.
- c. Ketua Pusat Studi Ketatanegaraan:  
Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M.
- d. Ketua Pusat Studi Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa:  
Drs. Teddy Nurcahyawan, S.H., M.A.
- e. Kepala subbagian Perpustakaan:  
Miswanto, S.H.

# **AKADEMIK**

## **A. Program Studi dan Kurikulum**

### **1. Program Studi : Sarjana (S1) Hukum**

- a. Kurikulum FH berbasis kompetensi;
- b. Konsentrasi peminatan, terdiri atas konsentrasi hukum bisnis, program peminatan (Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara dan Hukum Internasional);
- c. Beban studi ditetapkan dalam bentuk satuan kredit semester (sks). Beban studi minimal untuk diperoleh sarjana hukum adalah 148 sks, IPK minimal diperoleh 2.00, yang dapat ditempuh melalui masa studi minimal 7 dan maksimal 14 semester;
- d. Mata kuliah wajib nasional (kurikulum inti sebanyak 73 sks, mata kuliah wajib fakultas sebanyak 21 sks, peminatan 12 dan mata kuliah pilihan minimal 42 sks). Mata kuliah itu terbagi atas kelompok mata kuliah MPK, MKK, MKB, MPB, MBB dan mata kuliah prasyarat.
- e. Beban studi mahasiswa persemester berkisar antara 12-24 sks, yang ditentukan oleh IPK yang diperoleh mahasiswa setiap semester.

## **B. Pembelajaran dan Pemantauan Studi**

1. Pembelajaran: Sistem sks, masa pembelajaran (semester ganjil, genap dan ekstensi), kegiatan pembelajaran (tatap muka dan tugas terstruktur), Ujian (UTS, UAS dan komprehensif), tidak ada UTS dan UAS susulan/her, penilaian (nilai lulus minimal C; kualifikasi nilai 0-44 = E, 45-55 = D, 56-69 = C, 70-79 = B, 80-100 = A).
  - a. Sebelum mengisi rencana studi mahasiswa diberi atau dapat meminta jadwal kuliah dan ujian di Sekretariat FH;
  - b. Mahasiswa bebas memilih mata kuliah sesuai dengan beban studi maksimum yang memiliki (dapat dilihat pada kartu hasil studi/monitor komputer) namun mata kuliah yang diambilnya harus telah memenuhi prasyarat yaitu telah lulus atau sedang menempuh mata kuliah prasyarat

- atau memenuhi jumlah sks tertentu (dapat dilihat pada jadwal kuliah dan ujian);
- c. Bila ada mata kuliah pada semester sebelumnya tidak lulus, maka sebaiknya diambil pada semester berikutnya yang terdekat;
  - d. Beban studi maksimum yang dijadikan patokan adalah beban studi maksimum semester ganjil sebelumnya untuk mengambil beban studi maksimum semester ganjil berikutnya dan beban studi maksimum semester genap sebelumnya untuk mengambil beban studi maksimum semester genap berikutnya. Khusus mahasiswa semester pertama dan kedua diberi beban studi secara paket sebanyak 19 sks (ganjil) dan 20 sks (genap);
  - e. Mahasiswa yang telah merencanakan studi memiliki kartu studi sementara (KSS) yang diperoleh dari hasil pengisian di akun LINTAR Mahasiswa.
  - f. Pada awal memasuki semester yang akan ditempuh, mahasiswa wajib memenuhi persyaratan: membayar semua kewajiban keuangan sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan universitas, telah lulus mata kuliah prasyarat atau telah memenuhi jumlah sks prasyarat untuk mata kuliah baru;
  - g. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan mata kuliah atau jumlah sks tertentu, wajib mengganti mata kuliah yang telah diambilnya pada saat diadakan kegiatan perbaikan rencana studi melalui online (pada minggu kedua kuliah);
  - h. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi syarat keuangan, mata kuliah yang telah direncanakannya dipending (nama mata kuliah aka dihapus dari kartu studi mahasiswa) sampai dengan mahasiswa membayar kewajiban keuangan sampai dengan batas akhir kegiatan perbaikan rencana studi. Apabila sampai batas akhir belum membayar, maka rencana studinya dinyatakan batal dan mahasiswa dinyatakan berstatus non-aktif;
  - i. Mahasiswa yang belum melakukan registrasi atau yang telah melakukan registrasi rencana studi tetapi masih harus diperbaiki dapat melakukannya pada saat diadakan perbaikan rencana studi (melalui Lintar) pada minggu

kedua setelah kuliah atau jadwal yang ditetapkan pimpinan Fakultas;

- j. Mahasiswa tidak melakukan registrasi dinyatakan berstatus non-aktif.

## 2. Cuti Akademik

- a. Cuti akademik adalah status mahasiswa tidak aktif kuliah (cuti) yang resmi disetujui pimpinan Universitas;
- b. Cuti akademik dapat diambil oleh mahasiswa setelah aktif kuliah sekurang-kurangnya satu semester dan dapat diambil paling banyak 4 semester selama masa studi, tetapi tidak dapat diambil sekaligus (maksimal 2 semester berturut-turut);
- c. Cuti akademik diajukan dengan cara mengisi formulir permohonan cuti akademik (formulir diambil di Biro Adak), dengan ditandatangani mahasiswa dan Wakil Dekan, Sedangkan bagi yang prestasi akademiknya dibawah standar minimal wajib disetujui (ditandatangani) juga oleh dosen PA;
- d. Permohonan cuti yang disetujui akan ditetapkan dengan surat persetujuan cuti akademik atau ditolak cutinya akan ditetapkan dalam surat penolakan cuti akademik, yang keduanya ditandatangani oleh Wakil Rektor, yang disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dengan tembusan Wakil Dekan;
- e. Surat persetujuan atau penolakan cuti akademik wajib diarsip oleh mahasiswa yang bersangkutan sebagai bukti apabila suatu ketika diperlukan;
- f. Dalam masa cuti akademik, mahasiswa tidak dikenai biaya kuliah kecuali biaya administrasi;
- g. Masa cuti akademik tidak dihitung sebagai masa studi yang ditempuh mahasiswa.

## 3. Non-aktif

- a. Non-aktif adalah status mahasiswa yang tidak aktif kuliah dan tidak cuti akademik secara resmi;
- b. Masa non-aktif dapat diambil mahasiswa paling banyak dua semester selama masa studi;

- c. Mahasiswa yang telah non-aktif dua semester tidak dapat aktif kuliah kembali dan dinyatakan sebagai mahasiswa putus studi;
- d. Masa non-aktif dihitung sebagai masa studi;
- e. Dalam masa non-aktif, mahasiswa dikenakan semua kewajiban keuangan (biaya registrasi, BPP dan bipekskur).

#### **4. Mahasiswa Skorsan**

- a. Adalah mahasiswa yang diberikan sanksi akademik berupa skorsing karena terbukti melakukan pelanggaran;
- b. Mahasiswa skorsan wajib melakukan registrasi setiap semester dan membayar semua biaya kuliah, kecuali biaya sks;
- c. Meskipun melakukan registrasi, mahasiswa skorsan tidak berhak mengikuti kegiatan akademik pada masa skorsing;
- d. Masa skorsing dihitung sebagai masa studi yang ditempuh mahasiswa;

#### **5. Aktif Kuliah Kembali**

- a. Mahasiswa yang telah habis masa cuti akademik, non-aktif, atau skorsing dan ingin mengikuti kuliah kembali wajib mengajukan permohonan aktif kuliah kembali (formulir dapat diambil di Biro Adak), sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh universitas;
- b. Formulir permohonan aktif kuliah kembali diserahkan langsung ke Biro Adak;
- c. Atas dasar permohonan tersebut, Wakil Rektor meminta rekomendasi pimpinan Fakultas (Wakil Dekan) apakah permohonan aktif kuliah kembali dapat disetujui atau ditolak;
- d. Bila diperhitungkan tidak dapat menyelesaikan studi atau pada akhir semester 4 atau 8 harus putus studi atau telah habis masa studi (telah menempus semester ke-14) atau telah cuti akademik 2 semester berturut-turut, maka Wakil Dekan akan merekomendasikan agar Wakil Rektor menolak permohonan aktif kuliah mahasiswa yang bersangkutan;

- e. Apabila rekomendasi Wakil Dekan setuju aktif kuliah kembali, maka Wakil Rektor akan menetapkan surat persetujuan aktif kuliah kembali untuk mahasiswa yang bersangkutan;
- f. Bagi mahasiswa yang memiliki tunggakan keuangan, maka wajib melunasi semua tunggakan keuangan sebelum persetujuan aktif kembali dikeluarkan Wakil Rektor;
- g. Surat Persetujuan kuliah kembali disampaikan langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan dengan tembusan kepada Wakil Dekan;
- h. Mahasiswa yang telah persetujuan aktif kuliah kembali, berhak melakukan registrasi dan mengisi rencana studinya untuk semester yang akan ditemponya;
- i. Proses registrasi dan perencanaan studi adalah sama dengan mahasiswa yang bukan berasal dari cuti akademik atau non-aktif.

## **6. Mahasiswa Terancam Putus Studi**

- a. Mahasiswa terancam putus studi adalah mahasiswa yang pada semester ke-2, ke-3, ke-5, ke-6, ke-7, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, ke-13 yang memiliki prestasi akademik dibawah standar minimal yang ditetapkan fakultas (seperti telah disebutkan diatas);
- b. Mahasiswa ini wajib berada dibawah bimbingan dosen Pembimbing Akademik (PA) dan diupayakan agar keluar dari statusnya terancam putus studi;
- c. Mahasiswa ini masih punya hak melakukan kegiatan akademik, namun apabila diperhitungan tidak dapat diri atau pindah kuliah di program studi lain di lingkungan Untar atau di luar Untar, karena pada akhir masa studi dipastikan tidak dapat lulus (memperoleh gelar sarjana hukum)

## **7. Mahasiswa Mengundurkan Diri**

- a. Mahasiswa mengundurkan diri adalah mahasiswa yang menyatakan pengunduran diri dari statusnya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Untar;
- b. Pengunduran diri dilakukan dengan cara mengisi formulir pengunduran duru yang tersedia di Biro Adak;

- c. Atas dasar permohonan tersebut, Karo Adak meneruskan permohonan tersebut ke Rektor;
- d. Rektor mengeluarkan surat yang menetapkan mahasiswa mengundurkan diri dari statusnya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Untar, yang disampaikan Langsung ke mahasiswa yang bersangkutan dengan tembusan Wakil Dekan;
- e. Mereka berhak memperoleh surat keterangan pengunduran diri.

## **8. Mahasiswa Putus Studi**

- a. Mahasiswa putus studi adalah mahasiswa yang dinyatakan putus studinya (*drop out*) pada semester 4, 8 atau 14 karena tidak memenuhi prestasi akademik minimal atau karena dikenai sanksi putus studi (*drop out*) atas pelanggaran yang dilakukannya (misalnya melanggar pernyataan yang ditetapkan dalam pernyataan yang ditetapkan dalam surat pernyataan yang dibuatnya pada waktu akan menjadi mahasiswa Untar);
- b. Dengan dinyatakan putus studi, maka statusnya bukan lagi sebagai mahasiswa FH Untar;
- c. Mahasiswa ini dapat meminta surat keterangan pernah kuliah di FH Untar beserta transkrip nilai yang dapat digunakan bagi kepentingannya.

# KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

## A. Kemahasiswaan

### 1. Kegiatan Mahasiswa Baru

Kegiatan mahasiswa baru adalah kegiatan yang khusus dilakukan oleh mahasiswa baru, berupa pra-pendidikan tinggi (pradikti) yang diselenggarakan pada tingkat Universitas dan Fakultas (program studi) dan wajib diikuti oleh mahasiswa baru, dengan tujuan agar mahasiswa memahami ketentuan dan proses pembelajaran di Untar sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan prestasi akademik terbaik.

### 2. Organisasi Kemahasiswaan

- a. Di FH UNTAR terdapat organisasi kemahasiswaan yang didasarkan pada perwakilan aspirasi kemahasiswaan dan minat/bakat, yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) tingkat fakultas dan Mahasiswa Hukum Pencinta Alam (MAHUPA) serta majalah hukum ADIGAMA. Disamping itu ada pula kelompok-kelompok peminatan seperti Battle of Speech (BOS), Tarumanagara Young Lawyer Club (TYLEC) serta Tim Debat Hukum untuk berkompetisi dalam Philip C. Jessup Moot Court Competition dan sebagainya dibawah koordinasi BEM Fakultas melalui BINMA;
- b. Kegiatan di lingkungan organisasi diatas bersifat sukarela, namun bagi yang mengikutinya akan banyak memperoleh manfaat untuk melatih kemampuan fisik, manajemen, kemandirian dan pengembangan minat bakatnya;

### 3. Kegiatan Pengembangan Nalar

- a. Fakultas mengembangkan kegiatan kemahasiswaan yang bersifat pengembangan nalar untuk menunjang peningkatan kemampuan akademik mahasiswa. Kegiatan ini antara lain penelitian mahasiswa, pelatihan *legal entrepreneurship*, *speed reading*, pelatihan khusus profesi advokat, pelatihan menulis karya ilmiah, *pelatihan contract*



- drafting*, pelatihan *legal drafting*, pelatihan mediasi, pelatihan negosiasi, mengikuti lomba karya tulis ilmiah, mengikuti lomba debat hukum, mengikuti lomba puisi, membentuk kelompok diskusi untuk mengkaji berbagai isu actual yang menyangkut hukum dan sebagainya;
- b. Semua kegiatan tersebut dibawah bimbingan Kepala Program Studi dan organisasi kemahasiswaan;

#### 4. Beasiswa

Untar Menyediakan beasiswa, termasuk untuk mahasiswa fakultas hukum dengan kategori sebagai berikut:

- a. Golongan A, untuk mahasiswa kurang mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat keterangan Lurah, memiliki indek prestasi kumulatif (IPK) minimal 2.75, telah menempuh studi minimal 4 semester dan tidak dalam keadaan cuti akademik;
- b. Golongan B, untuk mahasiswa yang berprestasi akademik tertinggi di FH UNTAR, telah menempuh studinya sekurang-kurangnya 6 semester dan tidak dalam keadaan cuti akademik;
- c. Golongan C, untuk Ketua Organisasi Mahasiswa dengan syarat IPK minimal 2.50, memiliki prestasi di bidang intra dan ekstra kurikuler yang menonjol dan terukir di tingkat nasional/daerah yang membuktikan dengan surat dari penyelenggara/organisasi dan tidak dalam keadaan cuti akademik.

Beasiswa tersebut diberikan persemester, sehingga setiap semester dilakukan pembukaan permohonan beasiswa untuk semua mahasiswa Untar, termasuk mahasiswa FH UNTAR.

#### 5. Student Career Service

- a. Adalah wadah yang melayani mahasiswa dan alumni untuk mendapatkan pekerjaan atau magang;
- b. Fungsinya adalah mencari dan menerima informasi lowongan kerja untuk disampaikan kepada mahasiswa dan alumni, serta menyiapkan data mahasiswa yang memiliki

- prestasi akademik tinggi dan alumni untuk disampaikan kepada calon pengguna/penyedia lapangan pekerjaan;
- c. Wadah ini telah lama digagas dan telah di realisasikan dengan menampung beberapa tawaran dari perusahaan/ instansi lain;
  - d. Lembaga ini berada di bawah tanggung jawab Universitas.

## **B. Alumni**

1. Alumni adalah lulusan FH UNTAR;
2. Alumni sebagai Mitra FH UNTAR yang telah difungsikan sebagai pimpinan dan tenaga pengajar di FH UNTAR, sebagai penyalur lulusan FH UNTAR dalam mencari pekerjaan atau magang dan sebagai mitra pengembangan FH UNTAR.

## **C. Kemitraan dengan Orang Tua Mahasiswa**

1. Kemitraan dengan orang tua mahasiswa adalah hubungan kerja sama yang paling membantu guna keberhasilan proses pembelajaran mahasiswa di FH UNTAR.
2. Kemitraan ini telah dirintis dan beberapa upaya kearah ini sudah mulai dilakukan oleh FH UNTAR dengan cara mengundang orang tua mahasiswa melalui telepon dan *e-mail*, menerima pertanyaan dan usul orang tua melalui alat komunikasi maupun tatap muka saat pertemuan pimpinan FH UNTAR dengan orang tua mahasiswa.
3. FH UNTAR berupaya meningkatkan peran orang tua mahasiswa melauai wadah orang tua mahasiswa.

# ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

## A. Keuangan

1. Keuangan adalah biaya yang wajib dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada setiap semester yang akan ditempuhnya atau pada saat akan mengikuti kegiatan akademik tertentu, meliputi: biaya registrasi, Bipekskur, BPP, sks, ujian komprehensif, dan biaya lain yang ditetapkan berdasarkan kebijakan Universitas atau Fakultas. Khusus kelas sore diberlakukan sistem pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).
2. Mahasiswa wajib melunasi kewajiban keuangan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan Universitas (lihat brosur yang dikeluarkan Universitas setiap tahun akademik) atau ditetapkan FH UNTAR (lihat pengumuman yang dikeluarkan FH UNTAR) dan mengikuti prosedur administrasi yang ditetapkan oleh Universitas atau Fakultas.
3. Mahasiswa yang tidak melunasi kewajiban keuangan sampai dengan memasuki awal semester yang akan ditempuh, semua matakuliah yang telah direncanakan melalui *online* ditunda dan wajib segera dilunasi sampai dengan batas akhir kegiatan perbaikan rencana studi (dalam batas satu minggu pada minggu kedua kuliah). Apabila sampai dengan batas akhir tersebut mahasiswa tidak melunasinya, maka dinyatakan non-aktif kuliah;
4. Khusus untuk biaya sks, bagi mahasiswa yang belum dapat melunasinya, dapat diberi dispensasi penundaan pembayarannya dengan cara mengisi formulir penundaan pembayaran biaya kuliah yang disediakan di Fakultas.
5. Apabila sampai dengan memasuki ujian tengah semester (UTS) atau ujian akhir semester (UAS) ternyata mahasiswa tidak melunasi biaya kuliah, maka mahasiswa tersebut tidak diperbolehkan mengikuti ujian (UTS maupun UAS).
6. Khusus bagi yang skripsinya telah selesai dan siap diuji pada akhir semester sedangkan menurut kalender akademik mahasiswa tersebut wajib melakukan registrasi dan membayar biaya kuliah semester berikutnya, dapat mengajukan

- permohonan dispensasi pembayaran biaya kuliah dengan alasan tinggal menunggu ujian komprehensif sampai dengan akhir masa semester, agar bisa melakukan biaya kuliah dan apabila ternyata tidak berhasil pada ujian komprehensif, maka mahasiswa tersebut secara otomatis ter-registrasi pada semester berikutnya.
7. Apabila mahasiswa di atas tidak lulus ujian komprehensifnya, maka wajib melunasi biaya kuliah (kewajiban keuangan) untuk semester berikutnya sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam dispensasi pembayaran tersebut.
  8. Bagi yang ingin menempuh ujian komprehensif, wajib melunasi biaya ujian komprehensif sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan FH UNTAR. Apabila tidak melunasi biaya tersebut, maka mahasiswa tidak diperbolehkan mengikuti ujian komprehensif.
  9. Besaran biaya registrasi, bipekskur, BPP dan sks ditetapkan oleh Universitas menurut tahun angkatan masuk FH UNTAR, yang dapat dilihat pada brosur petunjuk kegiatan pendaftaran semester yang dikeluarkan setiap awal tahun akademik oleh Universitas sedangkan biaya ujian komprehensif ditetapkan sebesar Rp. 385.000,- setiap ujian komprehensif.
  10. Pembayaran/biaya kuliah dimaksud di atas dilakukan secara *Virtual Account* pada bank sesuai jadwal yang ditentukan oleh Universitas pada setiap awal semester.
  11. Apabila terjadi kegagalan *Virtual Account*, maka pembayaran dilakukan secara manual melalui rekening Yayasan Tarumanagara setiap bukti pembayarannya wajib dilegalisasi oleh bagian keuangan FH UNTAR dan Biro Keuangan Universitas.
  12. Khusus menyangkut administrasi perpustakaan, mahasiswa dikenai biaya pembuatan kartu anggota perpustakaan sebesar Rp10.000,- dan denda atas keterlambatan pengembalian pinjaman buku sebesar Rp500,- perhari yang dibayarkan langsung melalui Loker pelayanan keuangan FH UNTAR.

## **B. Administrasi Umum**

1. Administrasi umum adalah administrasi yang berkaitan dengan kepentingan umum sivitas akademik FH UNTAR termasuk kepentingan mahasiswa.
2. Administrasi umum yang berkaitan dengan mahasiswa meliputi: surat-menyurat mahasiswa, kearsipan data mahasiswa, pelayanan mahasiswa, pemeliharaan dan pengadaan sarana umum serta pengendalian ketertiban mahasiswa.
3. Mahasiswa dapat mengajukan berbagai surat dalam kaitannya dengan kegiatan sebagai mahasiswa kepada FH UNTAR sesuai dengan prosedur yang berlaku.
4. Mahasiswa dapat mengajukan data administrasi yang diperlukan dengan mengajukan permohonan kepada pimpinan Fakultas Hukum.
5. Mahasiswa dapat mengajukan usul dan saran perbaikan yang menyangkut administrasi umum kepada pimpinan Fakultas Hukum.

# KURIKULUM

## A. Program Studi Sarjana (S1) Hukum

Sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor 6082-KR/Untar/VI/2017 maka untuk mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2017/2018 dibutuhkan Kurikulum sebagai berikut:

Kurikulum FH UNTAR dijabarkan dalam bentuk mata kuliah. Dengan komposisi beban studi sebagai berikut:

Beban studi minimal (wajib ditempuh) lulusan program pendidikan strata satu (S-1) FH UNTAR adalah 148 sks, yang mencakup:

- a. Kurikulum inti (wajib ditempuh) sebanyak 73 sks;
- b. Kurikulum institusional (wajib ditempuh sebanyak 75 sks), yang meliputi:
  - 1) Kurikulum wajib fakultas (wajib ditempuh) sebanyak 21 sks;
  - 2) Kurikulum peminatan studi 5 peminatan (wajib ditempuh) sebanyak 12 sks;
  - 3) Kurikulum pilihan bebas (minimal menempuh) sebanyak 42 sks;
  - 4) Kurikulum pilihan (Program Sertifikasi).

Berikut tabel mata kuliah dalam kurikulum FH UNTAR:

| No.                       | KLPK MK | NAMA MATA KULIAH            | SKS | PRASYARAT   |
|---------------------------|---------|-----------------------------|-----|-------------|
| <b>I. Kurikulum Inti:</b> |         |                             |     |             |
| 1.                        | MPK     | Pendidikan Agama            | 2   | -           |
| 2.                        | MPK     | Pendidikan Kewarganegaraan  | 2   | -           |
| 3.                        | MPK     | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2   | -           |
| 4.                        | MPK     | Pendidikan Pancasila        | 2   | -           |
| 5.                        | MKK     | Bahasa Inggris              | 2   | -           |
| 6.                        | MKK     | Ilmu Negara                 | 3   | -           |
| 7.                        | MKK     | Pengantar Ilmu Hukum        | 4   | -           |
| 8.                        | MKK     | Pengantar Hukum Indonesia   | 4   | -           |
| 9.                        | MKK     | Hukum Perdata               | 4   | PIH dan PHI |
| 10.                       | MKK     | Hukum Pidana                | 4   | PIH dan PHI |
| 11.                       | MKK     | Hukum Tata Negara           | 4   | PIH dan PHI |

**PANDUAN AKADEMIK**

|               |     |                             |    |                                    |
|---------------|-----|-----------------------------|----|------------------------------------|
| 12.           | MKK | Hukum Internasional         | 4  | PIH dan PHI                        |
| 13.           | MKK | Hukum Islam                 | 2  | PIH dan PHI                        |
| 14.           | MKK | Hukum Adat                  | 3  | PIH dan PHI                        |
| 15.           | MKK | Hukum Agraria               | 2  | Hukum Perdata                      |
| 16.           | MKK | Hukum Pemerintahan Negara   | 4  | HTN                                |
| 17.           | MKB | Hukum Acara Perdata         | 4  | Hukum Perdata                      |
| 18.           | MKB | Hukum Acara Pidana          | 4  | Hukum Pidana                       |
| 19.           | MPB | PLKH – 1 (Litigasi Pidana)  | 2  | 110 sks dan<br>Hukum Acara Pidana  |
| 20.           | MPB | PLKH – 2 (Litigasi Perdata) | 2  | 110 sks dan<br>Hukum Acara Perdata |
| 21.           | MPB | PLKH – 3 (Non-Litigasi)     |    | 110 sks dan<br>Hukum Perusahaan    |
| 22.           | MKK | Metode Penelitian Hukum     | 3  | 120 sks dan PPI                    |
| 23.           | MBB | Filsafat Hukum              | 2  | 120 sks                            |
| 24.           | MBB | Etika Profesi               | 2  | 120 sks                            |
| 25.           | MPB | Penulisan Hukum/Skripsi     | 4  | 130 sks, PPI &<br>IPK minimal 2.00 |
| <b>Jumlah</b> |     |                             | 73 |                                    |

| No.   | KLPK<br>MK | NAMA MATA KULIAH                        | SKS | PRASYARAT                 |
|---|------------|---|-----|---------------------------|
| <b>II. Kurikulum Institusional:</b>   |            |   |     |                           |
| <b>A. Wajib Fakultas</b>  |            |   |     |                           |
| 26.   | MPK        | Kewirausahaan                           | 2   | -                         |
| 27.   | MKK        | Penalaran Hukum                         | 2   | Bahasa Indonesia          |
| 28.   | MKK        | Hukum Lingkungan                        | 3   | HAN/HPN                   |
| 29.   | MKK        | Hukum Dagang                            | 4   | Hukum Perdata             |
| 30.   | MKK        | Hukum Perusahaan                        | 2   | Hukum Dagang              |
| 31.   | MKK        | Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual     | 2   | Hukum Perdata             |
| 32.   | MBK        | Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara | 2   | HAN/HPN                   |
| 33.   | MKK        | Ilmu Perundang-undangan                 | 2   | HAN/HPN                   |
| 34.   | MKK        | Penulisan Proposal Ilmiah               | 2   | Penalaran Hukum & 100 sks |
| <b>Jumlah</b>   |            |   | 21  |                           |
| <b>B. Mata Kuliah Peminatan Studi (5 Program Peminatan)</b>                     |            |   |     |                           |
| <b>1. Program Peminatan Kompetensi Notaris (wajib ditempuh sebanyak 12 sks)</b> |            |   |     |                           |
| 35.   | MKB        | Hukum Perikatan                         | 2   | Hukum Perdata             |
| 36.   | MKB        | Hukum Waris Barat                       | 2   | Hukum Perdata             |
| 37.   | MKK        | Hukum Perbankan                         | 2   | Hukum Perdata             |
| 38.   | MKB        | Hukum Waris Adat                        | 2   | Hukum Adat                |
| 39.   | MKB        | Hukum Waris Islam                       | 2   | Hukum Islam               |

## PANDUAN AKADEMIK

|               |     |                                   |           |  |
|---------------|-----|-----------------------------------|-----------|--|
| 40.           | MKK | Hukum Jaminan                     | 2         | Hukum Perdata  |
| 41.           | MKB | Zakat dan Wakaf                   | 2         | Hukum Islam  |
| 42.           | MKB | Hukum Kekeluargaan dan Perkawinan | 2         | Hukum Perdata  |
| 43.           | MKK | Hukum Surat Berharga              | 2         | Hukum Dangang  |
| 44.           | MKB | Hukum Real Estate dan Perijinan   | 2         | Hukum Lingkungan & HAN/HPN                             |
| 45.           | MKK | Common Law                        | 2         | HI   |
| 46.           | MPB | PLKH – 5 (Teknik Pembuatan Akta)  | 2         | 110 sks  |
| 47.           | MPB | PLKH – 7 (Contract Drafting)      | 2         | 110 sks & Hukum Perusahaan                             |
| 48.           | MKK | Dasar – Dasar Manajemen           | 2         | -  |
| 49.           | MPB | Magang                            | 6         | IPK min. = 3.00<br>138 sks dan sedang menyusun skripsi |
| <b>Jumlah</b> |     |                                   | <b>34</b> |  |



| No.  | KLPK MK | NAMA MATA KULIAH                             | SKS | PRASYARAT  |
|--|---------|--|-----|--|
| <b>2. Program Peminatan Kompetensi Advokat (wajib ditempuh sebanyak 12 sks)</b>                    |         |  |     |  |
| 50.  | MKB     | Hukum Acara Peradilan Niaga                  | 2   | Hukum Perusahaan                                       |
| 51.  | MKB     | Hukum Acara Perselisihan Hubungan Industrial | 2   | Hukum Perburuhan                                       |
| 52.  | MKB     | Hukum Acara Peradilan Agama                  | 2   | Hukum Islam  |
| 53.  | MKB     | Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Konsumen   | 2   | Hukum Perlindungan Konsumen                            |
| 54.  | MKB     | Tindak Pidana Khusus Non-Ekonomi             | 2   | Hukum Pidana   |
| 55.  | MKK     | Kriminologi                                  | 2   | Hukum Pidana   |
| 56.  | MPK     | Hukum Perdata Internasional                  | 2   | HI & Hukum Perdata                                     |
| 57.  | MKK     | Transaksi Bisnis Internasional               | 2   | HI & Hukum Perdata                                     |
| 58.  | MKK     | Hukum Pembuktian                             | 2   | Hukum Pidana   |
| 59.  | MKK     | Hukum Perlindungan Anak                      | 2   | Hukum Perdata & Hukum Pidana                           |
| 60.  | MKB     | Hukum Lembaga Kehakiman                      | 2   | HTN  |
| 61.  | MPB     | PLKH – 6 (Legal Research dan Legal Opinion)  | 2   | 110 sks & Hukum Perdata                                |
| 62.  | MKB     | PLKH – 10(Internasional Moot Court)          | 2   | 110 sks & HI   |
| 63.  | MPB     | Magang                                       | 6   | IPK min. = 3.00<br>138 sks dan sedang menyusun skripsi |
| <b>Jumlah</b>  |         |  | 38  |  |
| <b>3. Program Peminatan Kompetensi Penasehat Hukum Perusahaan (wajib ditempuh sebanyak 12 sks)</b> |         |  |     |  |
| 64.  | MKK     | Hukum Transportasi                           | 2   | Hukum Dagang   |
| 65.  | MKK     | Hukum Asuransi                               | 2   | Hukum Dagang   |
| 66.  | MKK     | Hukum Investasi                              | 2   | Hukum Dagang   |
| 67.  | MKK     | Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan             | 2   | Hukum Perdata  |
| 68.  | MKK     | E-Commerce Law                               | 2   | HI & Hukum Dagang                                      |
| 69.  | MKB     | Hukum Perjanjian Internasional               | 2   | HI & Hukum Dagang                                      |
| 70.  | MKB     | Hukum Perdagangan Luar Negeri                | 2   | HI & Hukum Dagang                                      |
| 71.  | MKK     | Hukum Penyelesaian Sengketa Industrial       | 2   | Hukum Perburuhan                                       |
| 72.  | MKK     | Hukum Ekonomi Internasional                  | 2   | Hukum Perusahaan                                       |
| 73.  | MKB     | Kapita Selektif Hukum Bisnis                 | 2   | Hukum Perusahaan                                       |
| 74.  | MKK     | Hukum Kepailitan                             | 2   | Hukum Perusahaan                                       |
| 75.  | MKB     | Hukum Perusahaan Negara                      | 2   | Hukum Perusahaan                                       |
| 76.  | MKK     | Hukum Udara dan Angkasa                      | 2   | HI   |

| No.  | KLPK MK | NAMA MATA KULIAH                                    | SKS | PRASYARAT  |
|--|---------|---|-----|--|
| 77.  | MPB     | PLKH – 9 (Corporate Documen/ Legal Audit)           | 2   | Hukum Perusahaan                                       |
| 78.  | MPB     | Magang  | 6   | IPK min. = 3.00<br>138 sks dan sedang menyusun skripsi |
| <b>Jumlah</b>  |         |   | 34  |  |
| <b>4. Program Peminatan Kompetensi Konsultan Hukum (wajib ditempuh sebanyak 12 sks)</b>            |         |   |     |  |
| 79.  | MKB     | Tindak Pidana Khusus Ekonomi                        | 2   | Hukum Pidana   |
| 80.  | MKK     | Victimologi   | 2   | Hukum Pidana   |
| 81.  | MKK     | Konvensi Hukum Perdata                              | 2   | HI & Hukum Perdata                                     |
| 82.  | MKB     | Hak Asasi Manusia                                   | 2   | HTN  |
| 83.  | MKK     | Hukum Antar Tata Hukum                              | 2   | Hukum Perdata  |
| 84.  | MKK     | Hukum Lembaga Pembiayaan                            | 2   | Hukum Perdata  |
| 85.  | MKB     | Dasar-Dasar Penghapus, Peringan Dan Pemberat Pidana | 2   | Hukum Pidana   |
| 86.  | MKK     | Perbandingan Hukum Pidana                           | 2   | Hukum Pidana   |
| 87.  | MKK     | Perbandingan Hukum Perdata                          | 2   | Hukum Perdata  |
| 88.  | MKK     | Hukum Perlindungan Konsumen                         | 2   | Hukum Perdata  |
| 89.  | MKK     | Hubungan Internasional                              | 2   | HI   |
| 90.  | MPB     | PLKH – 7 (Contract Drafting)                        | 2   | PLKH – 3   |
| 91.  | MPB     | PLKH – 8 (Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan) | 2   | PLKH – 3   |
| 92.  | MKK     | Pengantar Ilmu Ekonomi                              | 3   | -  |
| 93.  | MPB     | Magang  | 6   | IPK min. = 3.00<br>138 sks dan sedang menyusun skripsi |
| <b>Jumlah</b>  |         |   | 35  |  |
| <b>5. Program Peminatan Kompetensi Pegawai Hukum Pemerintahan (wajib ditempuh sebanyak 12 sks)</b> |         |   |     |  |
| 94.  | MBB     | Sosiologi Hukum                                     | 2   | -  |
| 95.  | MKB     | Hukum Anggaran Negara                               | 2   | HTN  |
| 96.  | MKK     | Hukum Pajak   | 2   | HAN/HPN  |
| 97.  | MKB     | Hukum Lembaga Perwakilan Dan Kepresidenan           | 2   | HTN  |
| 98.  | MKB     | Hukum Pemerintahan Daerah                           | 2   | HAN/HPN  |
| 99.  | MKK     | Perbandingan Hukum Pemerintahan Negara              | 2   | HAN/HPN  |
| 100.   | MKK     | Perbandingan Hukum Tata Negara                      | 2   | HTN  |

| No.   | KLPK MK | NAMA MATA KULIAH  | SKS | PRASYARAT  |
|---|---------|---|-----|--|
| 101.  | MKK     | Hukum Pemerintahan Desa   | 2   | HAN/HPN  |
| 102.  | MKB     | Teori Perundang-Undangan  | 2   | IPU  |
| 103.  | MKB     | PLKH – 9 (Corporate Documen/ Legal Audit)   | 2   | 110 sks & IPU  |
| 104.  | MKB     | Hukum Laut  | 2   | HI   |
| 105.  | MKK     | Hukum Organisasi Internasional  | 2   | HI   |
| 106.  | MKB     | Hukum Kepegawaian dan Birokrasi Negara  | 2   | HAN/HPN  |
| 107.  | MKK     | Hukum Humaniter   | 2   | HI   |
| 108.  | MPB     | Magang  | 6   | IPK min. = 3.00<br>138 sks dan sedang menyusun skripsi |
| <b>Jumlah</b>                                       |         |   | 34  |  |
| <b>C. Mata Kuliah Pilihan (Program Sertifikasi)</b> |         |   |     |  |
| 109.  | MKB     | Pelatihan Negosiator  | 8   | 130 sks  |
| 110.  | MKB     | Pelatihan Mediator  | 8   | 130 sks  |
| 111.  | MKB     | Pelatihan Konsiliator   | 8   | 130 sks  |
| 112.  | MKB     | Pelatihan Arbiter Ad Hoc<br>Keterangan:<br>Mahasiswa hanya memilih satu mata kuliah di atas setiap pelatihan, mahasiswa mendapat sertifikasi. | 8   | 130 sks  |
| <b>Jumlah</b>                                       |         |   | 32  |  |

## B. Program Studi Magister (S2) Hukum

Sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor 6082-KR/Untar/VI/2017 maka dibutuhkan Kurikulum sebagai berikut:

| No.                                 | KODE MK  | NAMA MATA KULIAH                 | SKS | STATUS |
|-------------------------------------|----------|----------------------------------|-----|--------|
| <b>I. Kurikulum Inti:</b>           |          |                                  |     |        |
| 1.                                  | HK 62151 | Metode Penelitian Hukum Normatif | 3   | Wajib  |
| 2.                                  | HK 73341 | Tesis                            | 6   | Wajib  |
| <b>Jumlah</b>                       |          |                                  | 9   |        |
| <b>II. Kurikulum Institusional:</b> |          |                                  |     |        |
| 3.                                  | HK 61031 | Filsafat Hukum                   | 2   | Wajib  |
| 4.                                  | HK 61081 | Teori Hukum                      | 2   | Wajib  |

PANDUAN AKADEMIK

| No.           | KODE MK  | NAMA MATA KULIAH                          | SKS | STATUS  |
|---------------|----------|---|-----|---------|
| 5.            | HK 64041 | Hukum Perusahaan                          | 2   | Pilihan |
| 6.            | HK 64081 | Hukum Kontrak                             | 2   | Pilihan |
| 7.            | HK 64091 | Hukum Jaminan                             | 2   | Pilihan |
| 8.            | HK 63031 | Hukum Investasi/Penanaman Modal           | 2   | Pilihan |
| 9.            | HK 63071 | Hukum Pasar Modal                         | 2   | Pilihan |
| 10.           | HK 63041 | Hukum Kepailitan                          | 2   | Pilihan |
| 11.           | HK 63051 | Hukum Perwasitan/Arbitrase                | 2   | Pilihan |
| 12.           | HK 73061 | Hukum Perpajakan                          | 2   | Pilihan |
| 13.           | HK 73131 | Hukum Perbankan                           | 2   | Pilihan |
| 14.           | HK 73071 | Masalah Badan Hukum                       | 2   | Pilihan |
| 15.           | HK 73051 | Transaksi Bisnis Internasional            | 2   | Pilihan |
| 16.           | HK 73031 | Hukum Dagang Internasional                | 2   | Pilihan |
| 17.           | HK 73191 | Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional | 2   | Pilihan |
| 18.           | HK 73151 | Analisis Ekonomi Dari Hukum               | 2   | Pilihan |
| 19.           | HK 63061 | Hukum Perlindungan Konsumen               | 2   | Pilihan |
| 20.           | HK 73411 | Hukum Transportasi                        | 2   | Pilihan |
| 21.           | HK 71061 | Merger dan Akuisi                         | 2   | Pilihan |
| 22.           | HK 23231 | Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual       | 2   | Pilihan |
| 23.           | HK 64011 | Kapita Selektika Hukum Bisnis             | 2   | Pilihan |
| 24.           | HK 64061 | Hukum Persaingan Usaha                    | 2   | Pilihan |
| 25.           | HK 73181 | Hukum Udara dan Angkasa                   | 2   | Pilihan |
| 26.           | HK 63011 | Hukum Lingkungan                          | 2   | Pilihan |
| 27.           | HK 73221 | Tindak Pidana Ekonomi                     | 2   | Pilihan |
| 28.           | HK 61091 | Sosiologi Hukum                           | 2   | Pilihan |
| 29.           | HK 62011 | Sejarah Hukum                             | 2   | Pilihan |
| 30.           | HK 61111 | Politik Hukum                             | 2   | Pilihan |
| 31.           | HK 62161 | Metode Pelatihan Hukum Empiris            | 3   | Pilihan |
| 32.           | HK 74001 | E-Commerce Law                            | 2   | Pilihan |
| <b>Jumlah</b> |          |   | 61  |         |

**C. Program Studi Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

Sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor 5992-KR/Untar/II/2017 maka dibutuhkan Kurikulum sebagai berikut:

| No.                                 | KODE MK  | NAMA MATA KULIAH  | SKS | STATUS  |
|-------------------------------------|----------|---|-----|---------|
| <b>I. Kurikulum Inti:</b>           |          |   |     |         |
| 1.                                  | MK 73001 | Peraturan Jabatan Notaris dan PPAT  | 2   | Wajib   |
| 2.                                  | MK 37002 | Hukum Agraria dan Tanah   | 3   | Wajib   |
| 3.                                  | MK 73003 | Hukum Waris   | 2   | Wajib   |
| 4.                                  | MK 73004 | Hukum Perikatan   | 2   | Wajib   |
| 5.                                  | MK 73005 | Hukum Perbankan   | 2   | Wajib   |
| 6.                                  | MK 73006 | Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan   | 2   | Wajib   |
| 7.                                  | MK 73007 | Peraturan Lelang  | 2   | Wajib   |
| 8.                                  | MK 73008 | Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta   | 2   | Wajib   |
| 9.                                  | MK 73009 | Hukum Perusahaan  | 2   | Wajib   |
| 10.                                 | MK 73010 | Hukum Jaminan   | 2   | Wajib   |
| 11.                                 | MK 73011 | Kode Etik Notaris dan PPAT  | 2   | Wajib   |
| 12.                                 | MK 73012 | Hukum Pasar Modal   | 2   | Wajib   |
| 13.                                 | MK 73013 | Hukum Pajak   | 2   | Wajib   |
| 14.                                 | MK 73014 | Pembuatan Akta Notaris dan PPAT   | 2   | Wajib   |
| 15.                                 | MK 73015 | Teknik Pembuatan Akta I (Teknik Pembuatan Akta Pejabat dan Akta Hukum Keluarga) | 2   | Wajib   |
| 16.                                 | MK 73016 | Teknik Pembuatan Akta II (Teknik Pembuatan Akta Perbankan)                      | 2   | Wajib   |
| 17.                                 | MK 73017 | Metode Penelitian Hukum   | 3   | Wajib   |
| 18.                                 | MK 73018 | Teknik Pembuatan Akta III (Teknik Pembuatan Akta Properti dan Tanah)            | 2   | Wajib   |
| 19.                                 | MK 73019 | Teknik Pembuatan Akta IV (Teknik Pembuatan Akta Perusahaan dan Pasar Modal)     | 2   | Wajib   |
| 20.                                 | MK 73020 | Workshop teknik Pembuatan Akta  | 2   | Wajib   |
| 21.                                 | MK 73021 | Tesis   | 6   | Wajib   |
| <b>Jumlah</b>                       |          |   | 48  |         |
| <b>II. Kurikulum Institusional:</b> |          |   |     |         |
| 22.                                 | MK 73022 | Hukum Investasi   | 2   | Pilihan |
| 23.                                 | MK 37023 | Hukum Kepailitan  | 2   | Pilihan |
| 24.                                 | MK 73024 | Hukum Perwasitan/Arbitrase  | 2   | Pilihan |
| 25.                                 | MK 37025 | Politik Hukum Kenotariatan  | 2   | Pilihan |
| 26.                                 | MK 73026 | Masalah Badan Hukum   | 2   | Pilihan |

| No.           | KODE MK  | NAMA MATA KULIAH                          | SKS | STATUS  |
|---------------|----------|---|-----|---------|
| 27.           | MK 37027 | Transaksi Bisnis Internasional            | 2   | Pilihan |
| 28.           | MK 73028 | Hukum Dagang Internasional                | 2   | Pilihan |
| 29.           | MK 37029 | Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional | 2   | Pilihan |
| 30.           | MK 73030 | Analisis Ekonomi dari Hukum               | 2   | Pilihan |
| 31.           | MK 37031 | Hukum Perlindungan Konsumen               | 2   | Pilihan |
| 32.           | MK 73032 | Hukum Transportasi                        | 2   | Pilihan |
| 33.           | MK 37033 | Merger dan Akuisisi                       | 2   | Pilihan |
| 34.           | MK 73034 | Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual       | 2   | Pilihan |
| 35.           | MK 37035 | Kapita Selektta Hukum Bisnis              | 2   | Pilihan |
| 36.           | MK 73036 | Hukum Persaingan Usaha                    | 2   | Pilihan |
| 37.           | MK 37037 | Hukum Lingkungan                          | 2   | Pilihan |
| 38.           | MK 73038 | Tindak Pidana Ekonomi                     | 2   | Pilihan |
| 39.           | MK 37039 | Sosiologi Hukum                           | 2   | Pilihan |
| 40.           | MK 73040 | Sejarah Hukum                             | 2   | Pilihan |
| 41.           | MK 37041 | E-Commerce                                | 2   | Pilihan |
| <b>Jumlah</b> |          |   | 40  |         |

**Keterangan:**

Untuk lulus Magister Kenotariatan (M.Kn.) mahasiswa wajib menempuh dan lulus minimal 50 sks terdiri:

1. Mata Kuliah Wajib : 48 sks
2. Mata Kuliah Pilihan : 2 sks
3. IPK :  $\geq 3.00$

### D. Program Studi Doktor (S3) Hukum

Sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor 6114-KR/Untar/VI/2017 maka dibutuhkan Kurikulum sebagai berikut:

| No.                                 | KODE MK  | NAMA MATA KULIAH                 | SKS | STATUS |
|-------------------------------------|----------|----------------------------------|-----|--------|
| <b>I. Kurikulum Inti:</b>           |          |                                  |     |        |
| 1.                                  | HK 83031 | Metode Penelitian Hukum Normatif | 3   | Wajib  |
| 2.                                  | HK 83041 | Metode Penelitian Hukum Empiris  | 3   | Wajib  |
| 3.                                  | HK       | Disertasi                        | 32  | Wajib  |
| <b>Jumlah</b>                       |          |                                  | 38  |        |
| <b>II. Kurikulum Institusional:</b> |          |                                  |     |        |
| 4.                                  | HK 83021 | Filsafat Hukum                   | 2   | Wajib  |
| 5.                                  | HK 83011 | Teori Hukum                      | 2   | Wajib  |
| <b>Jumlah</b>                       |          |                                  | 4   |        |

Keterangan:

Bobot Satuan Kredit Semester (sks) untuk setiap tahap ujian Disertasi sebagai berikut:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Ujian Proposal                      | : 6 sks          |
| 2. Ujian Seminar Hasil Penelitian      | : 8 sks          |
| 3. Ujian Pra-Promosi (sidang tertutup) | : 14 sks         |
| 4. Ujian Promosi (sidang terbuka)      | : <u>4 sks</u> + |
| Jumlah                                 | : 32 sks         |

## **PENUTUP**

Keberhasilan proses pembelajaran tidak semata-mata ditentukan oleh lembaga penyelenggara pendidikan dengan segala fasilitasnya, namun ditentukan juga oleh faktor di luar itu. Keberadaan orang tua dan partisipasinya dalam sistem sks sangat berperan penting dalam keberhasilan pembelajaran. Karena itu, melalui pertemuan-pertemuan diharapkan timbul kebersamaan yang saling bersinergi sehingga proses pembelajaran dapat memenuhi harapan bersama.





**UNTAR**

FAKULTAS  
HUKUM



UNTARA

[fh.untar.ac.id](http://fh.untar.ac.id) | [fh@untar.ac.id](mailto:fh@untar.ac.id)